



Judul : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Masih Rendah, pemerintah diminta buat roadmap beasiswa nasional

Tanggal : Rabu, 25 Februari 2026

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 2

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi Masih Rendah

Pemerintah Diminta Buat Roadmap Beasiswa Nasional

Roadmap beasiswa nasional jangka panjang diusulkan untuk segera disiapkan. Hal ini bertujuan agar peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi menjadi agenda nasional serta dikerjakan secara terencana dan terukur.

Usulan ini datang dari Wakil Ketua Komisi X DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati. Usulan ini pun mendapat respons dari akademisi.

Kurniasih menekankan, peningkatan APK pendidikan tinggi

harus menjadi agenda nasional yang dikerjakan secara terencana dan terukur. Dia menyampaikan, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu.

"Namun program tersebut belum cukup jika berdiri sendiri tanpa integrasi dengan skema beasiswa lain," ujar Kurniasih.

Dia menilai, diperlukan sinergi seluruh skema beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian

Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, termasuk berbagai program beasiswa lain di luar KIP Kuliah, agar dampaknya terhadap peningkatan APK benar-benar signifikan.

"Kami mendorong Kementerian memiliki roadmap beasiswa nasional hingga 2029, lengkap dengan target capaian APK yang jelas," lanjut Kurniasih.

Sementara itu, Kepala Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Feriyan Syah menilai, masalah

pendidikan tinggi di Indonesia bukan hanya sekadar roadmap-nya, tapi kekurangan keberanian politik atau *political will*.

Menurut dia, diperlukan perubahan struktural yang lebih mengarahkan emansipasi dan afirmasi terhadap daerah-daerah tertentu di Indonesia.

"Kondisi Jawa, Sumatera, dengan daerah Indonesia Timur, disparitasnya sangat luar biasa. Sehingga pendidikan tinggi ini dalam kondisi berdasarkan kelas ekonomi dan kewilayahan,"

ungkapnya kepada *Rakyat Merdeka*, Senin (23/2/2024).

Terkait beasiswa, Feriyan Syah menilai harus ada *political will* yang kuat. Sehingga, lanjut dia, investasi besar untuk anggaran pendidikan benar-benar bisa dirasakan sebagai negara dengan bonus demografi.

"Jangan sampai nanti jadi bencana demografi," lanjutnya. Untuk mengetahui pandangan dari Kurniasih Mufidayati dan Feriyan Syah terkait *roadmap* beasiswa nasional, berikut petikan wawancaranya.

KURNIASIH MUFIDAYATI,
Wakil Ketua Komisi X DPR

Kita Butuh Untuk Kualitas Pendidikan



Apa maksud dari usulan Anda terkait roadmap beasiswa nasional?
Begini, peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi harus menjadi agenda nasional yang dikerjakan secara terencana dan terukur.

Memang kondisi beasiswa bagi mahasiswa saat ini bagaimana?

Saat ini, program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sudah berada di jalur yang tepat dalam membuka akses pendidikan tinggi bagi masyarakat kurang mampu. Namun program tersebut belum cukup jika berdiri sendiri tanpa integrasi dengan skema beasiswa lain. Dengan begitu, kami bisa melihat seberapa besar kontribusi anggaran beasiswa terhadap peningkatan akses kuliah.

Mengenal angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi saat ini seperti apa ya?

Saya melihat adanya data APK antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan kementerian terkait, yang saat ini sama-sama menunjukkan angka partisipasi pendidikan tinggi masih di bawah 35 persen. Artinya, dari setiap 100 anak usia kuliah, belum sampai

35 orang yang benar-benar sedang menempuh pendidikan tinggi.

Menurut Anda kenapa hal itu bisa terjadi?

Kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari berbagai tantangan struktural dalam ekosistem perguruan tinggi di Indonesia. Salah satunya adalah distribusi perguruan tinggi yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan terutama di kota-kota besar. Tantangan lainnya adalah kapasitas kampus yang belum seimbang dengan jumlah mahasiswa, serta kompetensi lulusan yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja.

Adakah penyebab lain sehingga Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi belum maksimal?

Kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) yang membuka kesempatan mahasiswa baru melalui berbagai jalur masuk. Di satu sisi, kebijakan tersebut positif karena memperluas akses, meningkatkan inklusivitas, serta mengakomodasi keragaman latar belakang peserta didik dengan jalur seleksi yang lebih fleksibel. Namun di sisi lain kebijakan ini

menimbulkan sejumlah dampak yang perlu diantisipasi.

Apa dampaknya?

Berpotensi menimbulkan ketimpangan kualitas akademik mahasiswa karena perbedaan mekanisme seleksi. Selain itu, tekanan terhadap PTS untuk bersaing mendapatkan mahasiswa baru makin besar, muncul gejala komersialisasi di PTS, dan persaingan yang tidak setara antara calon mahasiswa dari keluarga mampu dan kurang mampu.

Lantas, apa yang akan dilakukan Komisi X DPR terkait ini?

Komisi X DPR RI mendorong kebijakan pendidikan tinggi yang adil, terintegrasi, dan berorientasi pada perluasan akses sekaligus peningkatan mutu. Kami ingin lebih banyak anak Indonesia bisa kuliah, merasakan manfaat pendidikan tinggi, dan memiliki daya saing di dunia kerja. Untuk itu dibutuhkan sinergi seluruh skema beasiswa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, termasuk berbagai program beasiswa lain di luar KIP Kuliah. **■**

FERIYAN SYAH,

Kepala Bidang Penelitian & Pengembangan Pendidikan P2G

Butuh Political Will Untuk Perubahan



Anggota Komisi X DPR Kurniasih Mufidayati meminta Pemerintah agar membangun roadmap beasiswa nasional untuk tingkatkan angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Tinggi. Sebenarnya kondisi saat ini seperti apa?

Ada problem struktural yang sebenarnya terjadi di kondisi partisipasi kuliah anak-anak Indonesia, bukan sekadar minat kuliah, tapi kalau dilihat dari data APK pada pendidikan tinggi, masih di bawah 40 persen, bahkan masih di bawah 35 persen, yaitu 32 persen. Ini sebenarnya kondisi yang stagnan dan tertinggal jauh dari negara tetangga di kawasan ASEAN, seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, yang mana mereka sudah mencapai angka 40 persen ke atas. Nah, ini sebenarnya kondisi ketimpangan aksesnya yang sangat ekstrim.

Ketimpangannya seperti apa?

Akses pendidikan tinggi di perkotaan itu yang cukup lumayan tinggi, tetapi di pedesaan semakin rendah. Jadi kondisi Jawa, Sumatera, dengan daerah Indonesia Timur, disparitasnya sangat luar biasa. Sehingga pendidikan tinggi ini dalam kondisi berdasarkan kelas ekonomi dan kewilayahan. Ini sebenarnya

momentum untuk negara agar bisa menjadikan pendidikan sebagai satu transisi sehingga bonus demografi ini benar-benar diproduksi. Bukan justru dibuang dengan percuma, seperti itu.

Kurniasih menilai, KIP maupun beasiswa pendidikan yang ada sudah berkontribusi, tapi belum maksimal. Apakah Anda sependapat?

Sebenarnya ada skala kebijakan yang menurut saya gagal untuk menjawab kebutuhan nyata. Ada sekitar 900an ribu kondisi calon mahasiswa, namun hanya sekitar 200an ribu yang diterima. Artinya, ada banyak anak-anak berprestasi dari masyarakat, atau anak-anak miskin yang ditolak atau tidak terafirmasi dalam skema beasiswa ini. Nah, tentu menjadi ironi ketika anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dibandingkan dengan anggaran yang lain. Ini menunjukkan, sekian-akun akses terhadap pendidikan tinggi bukan menjadi prioritas strategis negara. Jadi, seperti ada pembiaran, ketika anak-anak muda dari kalangan miskin ini justru teresih dan dia tidak terafirmasi.

Selaku terkait beasiswa ini seperti apa?

Untuk beasiswa pendidikan tinggi itu butuh *political will* yang kuat. Sehingga, investasi benar-benar bisa dirasakan sebagai negara dengan bonus demografi. Jangan sampai nanti jadi bencana demografi.

Selain itu, Mufidayati juga menyuarakan jalar penerimaan masuk mahasiswa untuk PTS, yang menurutnya semakin banyak, namun berdampak negatif dari sisi daya saing untuk ke depannya, apa ada tanggapan?

Saya memercati dengan banyaknya jalur masuk PTS, ada dari penilaian TKA dan sebagainya. Tetapi, ini sering diglorifikasi sebagai memperluas akses. Namun, ini justru seperti ilusi keterbukaan.

Maksudnya bagaimana?

Ya karena jalur mandiri itu sebenarnya lebih menguntungkan kelompok anak-anak dari kalangan ekonomi menengah ke atas, yang lebih siap untuk memaksakan perguruan tinggi negeri. Apalagi kelas-kelas yang ujian seperti SNBT dan sebagainya, anak-anak yang ikut bimbel dan sebagainya itu, lebih siap daripada anak-anak miskin untuk mengakses pendidikan tinggi. Sehingga PTS favorit saat ini terjadi *overcrowding*. **■**